

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan juga Papua. Namun, negara kepulauan ini memiliki kewaspadaan terhadap bencana alam yang kerap kali melanda kepulauan tersebut. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU nomor 24 tahun 2007). BNPB (2020), menjelaskan keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia sebagai negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Supartoyo dan Suroso (dalam Supartoyo, Cecep, DJ, 2014) menjelaskan bahwa Daerah Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah rawan bencana gempabumi di Indonesia, karena terletak dekat dengan sumber gempa bumi yang berada di darat dan di laut. Sumber-sumber gempa bumi tersebut terbentuk akibat

proses tektonik yang terjadi sebelumnya. Sumber gempa bumi di laut berasal dari penunjaman Sulawesi Utara yang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi, sedangkan sumber gempa bumi di darat bersumber dari beberapa sesar aktif di daratan Sulawesi Tengah, salah satunya adalah Sesar Palu Koro (Supartoyo, dkk., 2014). Bencana alam adalah siklus alam yang akan selalu berulang. Sulawesi menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak sesar aktif dan berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi. Potensi bencana yang diakibatkan oleh sesar aktif di daratan dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan gempa bumi yang bersumber di lautan yang terjadi pada magnitudo yang sama. Gempa dapat disebabkan oleh lempengan bumi yang saling bertumbukan satu sama lain.

Sulawesi tidak hanya menjadi wilayah yang rawan bencana gempa bumi, namun juga bencana lainnya seperti likuifaksi yang terjadi pada September 2018 (Info Bencana BNPB, 2018). Likuifaksi merupakan suatu kejadian, dimana kondisi tanah kehilangan kekuatan geser karena meningkatnya tegangan air pori sebagai akibat terjadinya beban gempa yang sangat cepat dan dalam waktu sesaat (Idriss dan Boulanger, 2008). Likuifaksi berlangsung pada tanah berpasir yang mudah terendam air, seperti tanah di Kota Palu yang dekat dengan laut. Guncangan yang ditimbulkan gempa menyebabkan tanah kehilangan iukatan sehingga melarut seperti air mengalir.

Beberapa dampak yang dirasakan warga Sulawesi setelah terjadinya bencana alam tersebut antara lain, terdapat korban jiwa sebanyak 4.340 orang,

berbagai fasilitas umum hancur seperti rumah sakit, hotel, dan pusat perbelanjaan hingga tempat tinggal warga terutama yang berada di sepanjang Pantai Teluk Palu dan di daerah Petobo, dan Sibalaya (Antara, 2019). Selain itu, bencana alam ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi warga yang juga terhenti hal ini diakui oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Longki Djanggola. Kerugian material yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami dan juga likuifaksi juga mempengaruhi kesehatan mental bagi korban yang selamat dari bencana.

Duka yang mendalam atas kehilangan saudara, harta benda hingga merasakan secara langsung pengalaman yang kurang menyenangkan yang dialami para korban. Kondisi tersebut dapat menimbulkan trauma yang berbeda pada setiap individu, tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakangi individu tersebut. Resiliensi, tingkat keparahan trauma, derajat pemaparan, ketersediaan dukungan sosial, penggunaan respons *coping* aktif dalam menghadapi stress traumatik hingga perasaan malu inilah yang diduga dapat mengembangkan kerentanan terhadap PTSD (*post traumatic syndrome disorder*) (Nawangsih, 2014). Sebuah survey yang dilakukan oleh WHO (2013), menunjukkan bahwa 12 bulan setelah adanya peristiwa bencana, sebagian besar korban bencana alam tetap memiliki reaksi psikologis yang normal. Sekitar 15-20% populasi mengalami gangguan mental ringan atau sedang yang merujuk pada kondisi PTSD. Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan bentuk depresi dan gangguan kecemasan ringan dan sedang, termasuk PTSD ringan dan sedang. Sedangkan 3-4% mengalami

gangguan parah seperti, psikosis, depresi berat, dan beberapa gangguan kecemasan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh pemerintah setempat. Dimana pemerintah telah mencoba untuk mengadakan penanganan bencana, seperti relokasi pemukiman warga pantai Talise yang terkena dampak bencana alam, tsunami. Pemerintah membantu penduduk tersebut untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi warga dengan cara memindahkan tempat tinggal yang tidak layak ke tempat tinggal yang baru berupa rumah hunian sementara (huntara) untuk nantinya disediakan rumah susun oleh pemerintah sesuai tata ruang yang berlaku. Hal ini didukung oleh peraturan Undang-undang Pasal 2, Nomor 2 Tahun 2012, dimana tujuan pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Salah satu bentuk dukungan sosial dari pemerintah tersebut, selain diharapkan membangun perekonomian kembali daerah, juga dapat membantu warga pantai Talise bangkit dari keterpurukannya dan dapat beraktifitas kembali di lokasi relokasi yang sudah disediakan. Walikota Palu Hidayat menegaskan, hutan kota disulap jadi pusat kuliner agar pantai Talise yang sudah ditetapkan sebagai zona merah tidak lagi ditempati untuk aktivitas jajanan masyarakat (Patar, 2019). Namun usaha yang telah direncanakan oleh Pemerintah tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar, lantaran adanya beberapa warga yang

memilih untuk kembali dan menetap di daerah rawan bencana. Peneliti melakukan *preliminary study* dengan melakukan observasi beberapa warga yang membangun kembali rumah-rumah disekitar pantai, tempat yang sama dimana rumah mereka sebelumnya berdiri.

Pilihan untuk menetap di daerah kawasan rawan bencana adalah suatu tindakan yang memiliki ancaman bagi warga. Ancaman tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : faktor alam, non alam dan faktor sosial. Beberapa ancaman bencana tersebut, tentunya memiliki risiko seperti adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, gangguan ekonomi, penurunan kesehatan, hingga adanya gangguan psikologis. Hal ini dikarenakan oleh sifat bencana yang tidak terduga, dan berlangsung dengan cepat.

Kondisi yang berbeda dialami oleh warga pantai Talise, Donggala, dimana mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di lokasi rawan bencana. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengambilan keputusan warga Donggala untuk menetap kembali di Kawasan rawan bencana. Disamping itu, penelitian ini dirasa penting untuk melihat dan memahami kesiapan diri pada individu baik secara mental maupun fisik yang akan menentukan bagaimana kelak ia bisa bertahan, memandang dan menilai baik atau buruknya keadaan yang akan datang setelah mengalami kejadian yang traumatik. Peneliti juga bermaksud memberikan edukasi preventif yang lebih efektif dan tepat dalam pelaksanaan penanganan bencana alam, relokasi, maupun mitigasi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk kembali menetap di kawasan rawan bencana.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya ataupun para pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk kembali menetap di kawasan rawan bencana, sehingga bisa menjadi tambahan *literature* bagi perkembangan ilmu psikologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kebermanfaatan bagi bidang-bidang tertentu dalam psikologi maupun dalam disiplin ilmu kemanusiaan lain. Serta menjadi bahan pertimbangan untuk lebih memahami faktor dan alasan yang mempengaruhi seseorang lebih memilih untuk kembali menetap di kawasan rawan bencana.